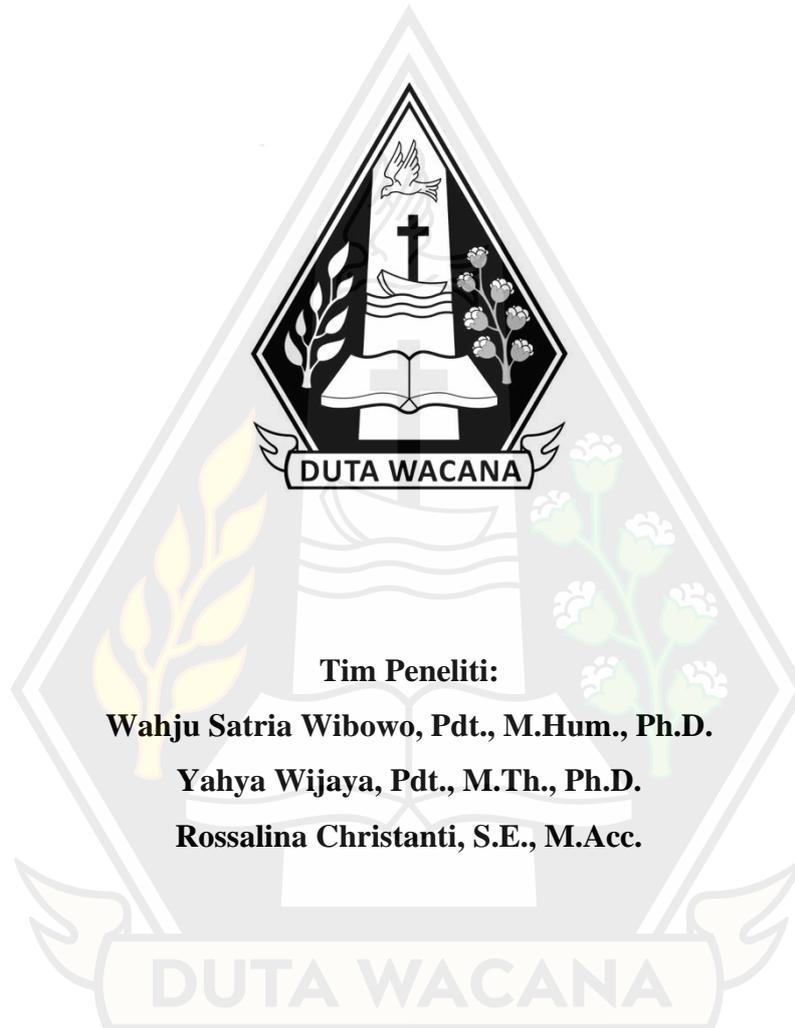


LAPORAN AKHIR

**ANALISA PERSEPSI TRANSPARANSI PENGUNGKAPAN INFORMASI
FINANSIAL LEMBAGA GEREJA**



Tim Peneliti:

Wahju Satria Wibowo, Pdt., M.Hum., Ph.D.

Yahya Wijaya, Pdt., M.Th., Ph.D.

Rossalina Christanti, S.E., M.Acc.

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

2021

DAFTAR ISI

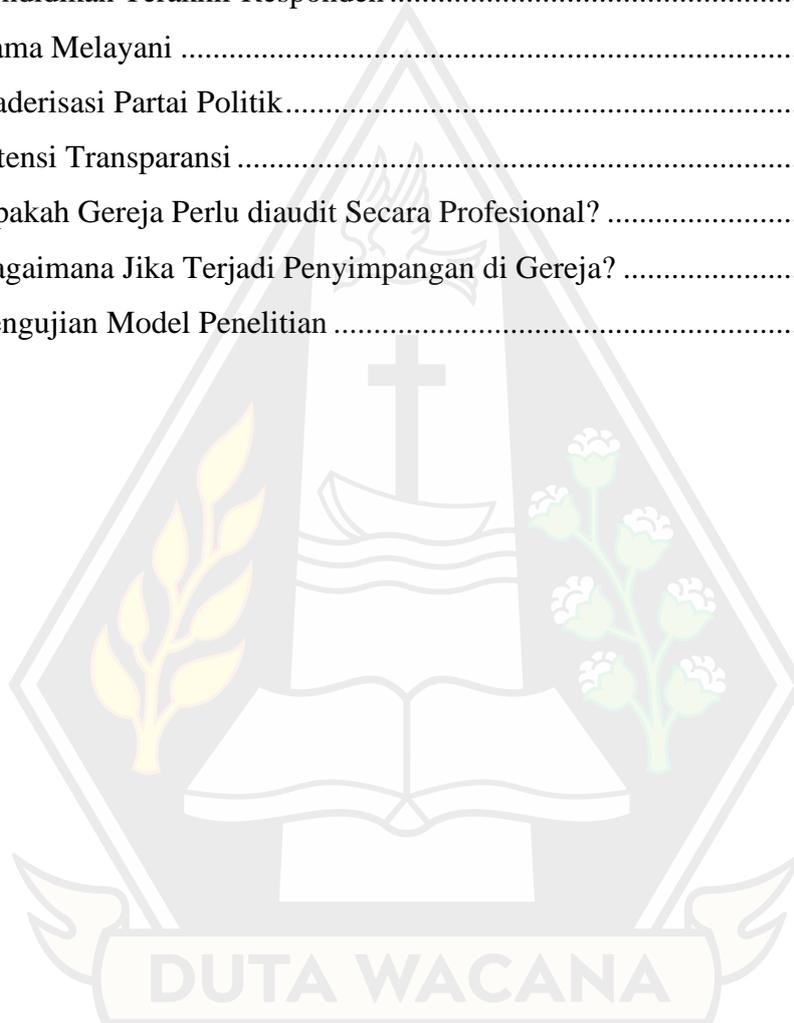
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR TABEL.....	VI
PRAKATA.....	VII
RINGKASAN.....	VIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	2
C. RUMUSAN MASALAH.....	3
D. PERTANYAAN PENELITIAN.....	3
E. LUARAN DAN HASIL PENELITIAN.....	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. LANDASAN TEORI.....	4
A.1. <i>Nonprofit Governance</i>	4
A.2. <i>Sistem Pengendalian Internal Gereja dan Kerangka Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba</i>	5
A.3. <i>Teori Prediksi Perilaku</i>	6
A.4. <i>Dimensi Etis Teologis</i>	7
B. PENGEMBANGAN MODEL PENELITIAN.....	7
BAB III.....	11
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	11
A. TUJUAN PENELITIAN.....	11
B. MANFAAT PENELITIAN.....	11
BAB IV.....	13
METODOLOGI PENELITIAN.....	13
A. ROADMAP PENELITIAN.....	13
B. PENDEKATAN PENELITIAN.....	14
C. OBJEK PENELITIAN, TEKNIK PENGAMBILAN DATA, TEKNIK PENGOLAHAN DATA.....	15
C.1. <i>Objek Penelitian</i>	15
C.2. <i>Teknik Pengambilan Data</i>	15
C.3. <i>Teknik Pengolahan Data</i>	16
D. TAHAPAN PENELITIAN.....	17
BAB V.....	18
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	18
A. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	18

B. DATA DEMOGRAFI RESPONDEN	18
C. ANALISIS DESKRIPTIF ATAS INTENSI TRANSPARANSI	19
D. <i>PARTIAL LEAST SQUARE STATISTICAL EQUATION MODELING</i>	22
D.1. <i>Pengujian Model Pengukuran (Measurement Model)</i>	23
D.2. <i>Pengujian Model Struktural (Structural Model)</i>	25
BAB VI.....	27
KESIMPULAN.....	27
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	31
LAMPIRAN 1. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN.....	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian.....	9
Gambar 4. 1 Rencana Induk Penelitian UKDW Bidang Humaniora.....	13
Gambar 4. 2 Roadmap Penelitian Wahyu Satrio Wibowo, Ph.D.	14
Gambar 4. 3 Roadmap Penelitian Rossalina Christanti, S.E., M.Acc.	14
Gambar 5. 1 Usia Responden.....	18
Gambar 5. 2 Pendidikan Terakhir Responden	18
Gambar 5. 3 Lama Melayani	18
Gambar 5. 4 Kaderisasi Partai Politik.....	18
Gambar 5. 5 Intensi Transparansi	19
Gambar 5. 6 Apakah Gereja Perlu diaudit Secara Profesional?	21
Gambar 5. 7 Bagaimana Jika Terjadi Penyimpangan di Gereja?	21
Gambar 5. 8 Pengujian Model Penelitian	22



DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1	23
Tabel 5. 2	24
Tabel 5. 3	24
Tabel 5. 4	25
Tabel 5. 5	26



PRAKATA

Pandemi menjadi tantangan yang besar bagi umat manusia, tidak terkecuali juga sektor pendidikan yang sedikit-banyak terimbas. Walaupun pendidikan termasuk salah satu sektor yang bisa menjadi fleksibel, tentu saja banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Penelitian ini membutuhkan banyak responden untuk dapat menangkap fenomena yang nantinya dapat dianalisa. Pada pelaksanaannya, banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh peneliti supaya penelitian ini dapat terus berjalan dan memberikan kontribusi bagi dunia akademik.

Transparansi merupakan motivasi intrinsik yang dimiliki oleh seorang individu. Tidak semua individu dengan terbuka mengakui motivasi-motivasi yang ada dalam dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penelitian ini berada dalam bidang etika dan berperilaku individu yang ada dalam satu kelompok. Dimensi etis dan berperilaku ini dapat menjadi dasar bagi seorang individu untuk mengambil keputusan. Harapannya, penelitian ini dapat menangkap motivasi-motivasi tersebut dengan lebih jelas, sehingga dapat menggambarkan model berperilaku dengan lebih valid.

Yogyakarta, 17 Agustus 2021

Peneliti,
Pdt. Wahyu S. Wibowo, Ph.D.
Prof. Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D.
Rossalina Christanti, S.E., M.Acc.

Merdeka!

RINGKASAN

Transparansi informasi finansial menjadi isu yang krusial sekaligus sensitif bagi lembaga gereja. Banyaknya kasus-kasus korupsi terselubung yang terjadi di dalam koridor lembaga gereja bukan menjadi isu yang baru. Perbedaannya, korupsi-korupsi ini cenderung lebih tersamarkan karena adanya bias persepsi harta gereja yang sakral dan tidak dapat serta-merta dituntut pertanggungjawabannya layaknya pada organisasi bisnis. Konsep persembahan dan segala aset gereja yang adalah milik Tuhan juga membuat komplikasi pengelolaan keuangan dalam lingkup lembaga gereja.

Sebagai organisasi non-profit, gereja harus mempertahankan integritasnya dengan menunjukkan praktik-praktik yang akuntabel di berbagai bidang, termasuk keuangan. Majelis jemaat sebagai pemimpin dan pengelola keuangan memiliki peranan penting dalam terbentuknya aspek akuntabilitas organisasi. Dengan demikian, penelitian ini menganalisa sikap majelis jemaat tentang transparansi informasi finansial yang ada dalam lembaga gereja, langkah-langkah praktis yang sudah dilakukan di jemaat, serta analisa etis yang dibangun di dalamnya.

Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus dan studi literatur untuk menggali motivasi-motivasi pemimpin-pemimpin gereja dalam mengelola keuangan gereja. Motivasi-motivasi atas pengelolaan dan keterbukaan tersebut akan dibandingkan dengan praktik-praktik riil mengenai tata kelola keuangan gereja, sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat dibuat satu kerangka sistem pelaporan keuangan gereja yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa praktik-praktik pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas pemimpin dan pengelola keuangan lembaga gereja, dan memberikan analisa etis-teologis. Hasil dari analisa praktik-praktik tersebut akan dijadikan dasar pembuatan rekomendasi kerangka penyusunan laporan keuangan gereja yang relevan digunakan oleh gereja dari berbagai denominasi. Dalam jangka panjang, penelitian ini akan dikembangkan dan diperluas ke level persepsi jemaat terhadap keterbukaan informasi finansial ini.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang belum banyak dijadikan sebagai salah satu nilai utama yang diinternalisasi dan diusung di dalam organisasi non-profit. Gereja merupakan salah satu organisasi yang tergolong dalam organisasi non-profit dan tidak memiliki akuntabilitas publik layaknya organisasi-organisasi bisnis. Prinsip transparansi dan akuntabilitas seringkali diabaikan oleh pemimpin-pemimpin gereja, khususnya dalam hal keterbukaan aspek finansial kelembagaan. Resistensi untuk mengungkapkan informasi-informasi finansial bisa dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan seperti: pemahaman atas persembahan sebagai sesuatu yang sukarela dan tidak perlu dipublikasikan, kekhawatiran akan berkurangnya pemasukan apabila jemaat mengetahui bahwa gereja sudah “mampu” dalam hal finansial, atau belum adanya tata kelola keuangan gereja yang baik.

Bagi organisasi-organisasi non-profit yang bergerak di bidang selain keagamaan, transparansi dan pengungkapan informasi keuangan secara sukarela (*voluntary disclosure*) diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dalam mencari donatur, meminimalkan pajak, atau meningkatkan citra dan reputasi organisasi (Hofmann & McSwain, 2013). Motivasi-motivasi tersebut tidak sepenuhnya relevan bagi lembaga gereja, mengingat tidak adanya kepentingan yang signifikan dengan otoritas perpajakan. Namun demikian, bagi lembaga gereja, transparansi dan akuntabilitas publik yang baik dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jika pengambilan keputusan dilakukan dalam lingkup organisasi bisnis, tolok ukurnya sangat mudah – yaitu keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan finansial dalam rangka optimalisasi profit. Pada lembaga gereja, konteks pengambilan keputusan dapat terwujud dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemimpin-pemimpin gereja (Mendoza Ovando, 2020).

Pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan yang tidak tepat dapat berdampak pada beberapa aspek diantaranya; kerugian finansial, ketidakefisienan kegiatan-kegiatan gereja, dan timbulnya konflik antar-jemaat atau antar-pemimpin gereja. Terbukti, tidak sedikit konflik-konflik yang terjadi di gereja yang berdampak masif (Faizal, 2017; Gabrillin, 2015; Ikhsan, 2020). Mayoritas penyebab konflik-konflik yang terjadi di dalam gereja tersebut merupakan tata kelola keuangan yang buruk.

Dilihat dari sudut pandang yang lain, resistensi untuk membangun transparansi publik seringkali didasarkan pada pemahaman jemaat atas konsep persembahan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nonlaba, tertera bahwa perbedaan entitas nirlaba dan entitas bisnis terletak pada cara entitas atau organisasi memperoleh pendanaan. Entitas nirlaba memperoleh pendanaan dari sumbangan yang diberikan oleh para penyumbang yang tidak meminta imbalan apapun dari entitas tersebut, serta penggunaan sumbangan tidak dibatasi oleh tujuan tertentu oleh penyumbang. Atas persepsi inilah, para pemimpin atau pengelola keuangan gereja berpandangan bahwa transparansi aspek finansial tidak perlu dilakukan, karena jemaat tidak mengharapkan imbalan atas persembahan yang diberikan.

Transparansi keuangan di jemaat mempunyai aspek etis yang tidak dapat disangkal. Pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan baik secara sistem maupun kegunaan menunjukkan kemampuan pengelolaan yang baik. Dalam Perjanjian Baru, ada kata *oikonomos* yang berarti pengelolaan rumah tangga, dan maknanya berkembang menjadi pengelolaan jemaat atau penataan jemaat. Di dalamnya ada makna pengelolaan keuangan. Pengelolaan dan penataan anugerah Allah bagi seluruh jemaat, bahkan umat manusia. Tujuannya adalah untuk keselamatan umat Allah. Ada rencana Allah dalam penataan/pengelolaan itu. Dengan demikian transparansi bukan hanya soal sistem pencatatan keuangan, namun soal keterbukaan, kepercayaan dan kegunaan yang berkaitan dengan keselamatan bagi seluruh umat atau komunitas.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus dan studi literatur untuk menggali motivasi-motivasi pemimpin-pemimpin gereja dalam mengelola keuangan gereja serta sampai seberapa jauh para pemimpin gereja bersedia terbuka mengenai informasi finansial lembaga gereja. Motivasi-motivasi atas pengelolaan dan keterbukaan tersebut akan dibandingkan dengan praktik-praktik riil mengenai tata kelola keuangan gereja, sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat dibuat satu kerangka sistem pelaporan keuangan gereja yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Penelitian ini berada dalam lingkup bidang filsafat keilahian, etika, dan akuntansi, yang saling beririsan dan didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya sebagai acuan (Hofmann & McSwain, 2013; Mendoza Ovando, 2020). Sasaran utama objek penelitian ini adalah majelis jemaat GKI (Gereja Kristen Indonesia) dan GKJ (Gereja Kristen Jawa) yang berada dalam

lingkup klasis Yogyakarta dan Surakarta. Tidak menutup kemungkinan responden penelitian dapat diperluas ke denominasi lain.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah; sebagai organisasi non-profit, gereja harus mempertahankan integritasnya dengan menunjukkan praktik-praktik yang akuntabel di berbagai bidang, termasuk keuangan. Majelis jemaat sebagai pemimpin dan pengelola keuangan memiliki peranan penting dalam terbentuknya aspek akuntabilitas organisasi. Penelitian ini menganalisa sikap majelis jemaat tentang transparansi informasi finansial yang ada dalam lembaga gereja, langkah-langkah praktis yang sudah dilakukan di jemaat, serta analisa etis yang dibangun di dalamnya.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah motivasi-motivasi yang mendasari pemimpin gereja dan pengelola keuangan gereja untuk terbuka atau tidak terbuka mengenai kondisi finansial gereja?
2. Apakah majelis jemaat memiliki persepsi bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral untuk mempublikasikan informasi finansialnya kepada jemaat?
3. Apakah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba relevan diterapkan dan tetap bernilai etis bagi lembaga gereja?

E. Luaran dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berupa rekomendasi kerangka konseptual pelaporan keuangan dalam lingkup gereja sebagai organisasi non-profit yang memiliki keunikan dibandingkan dengan bentuk-bentuk organisasi non-profit lain. Selain itu, hasil penelitian yang lebih praktis adalah *template* laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban pengelola keuangan gereja atas persembahan dan dana-dana lain yang didapatkan oleh gereja. *Template* laporan keuangan ini dapat digunakan seluas-luasnya oleh gereja dengan berbagai denominasi.

Luaran penelitian ini berupa publikasi pada jurnal nasional bereputasi dan konferensi ilmiah tingkat nasional.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa faktor utama penentu intensi transparansi keuangan di lembaga gereja adalah tanggung jawab moral majelis jemaat. Tanggung jawab moral dicerminkan dari 3 indikator, tanggung jawab moral yang timbul dari diri sendiri, tanggung jawab moral yang timbul dari rekan kemajelisan, serta tanggung jawab moral yang timbul atas desakan dari jemaat. Tanggung jawab moral yang dimiliki dari seorang individu akan berpengaruh terhadap niat untuk melakukan suatu aksi. Temuan ini konsisten dengan teori yang diacu, bahwa tanggung jawab moral yang muncul pada “situasi etis” akan sangat berperan dalam membentuk niat dan keputusan seorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Bobek & Hatfield, 2003; Gorsuch & Ortberg, 1983).

Hasil pengujian statistik ini dikonfirmasi dengan hasil *in-depth interview*, bahwa sebagai pengelola uang jemaat, majelis merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola keuangan gereja dengan baik. Tanggung jawab moral ini juga diwujudkan dengan niat yang kuat untuk melaporkan informasi-informasi keuangan kepada jemaat. Apabila ditelusuri lebih lanjut, elemen tanggung jawab moral yang paling kuat adalah dorongan dari jemaat – yang mendorong para pengelola keuangan untuk mengusahakan budaya transparansi di lingkungan gereja. Secara tradisional, gereja-gereja yang beraliran Calvinis mengandalkan dorongan dari luar individu, seperti komunitas, hukum atau aturan, untuk menegakkan tindakan etis. Tindakan moral individu berada dalam kekuatan pengaruh komunitas. Dengan demikian komunitas berperan sangat penting dalam mengarahkan individu, khususnya aktivis atau MJ yang mengelola keuangan.

Niat untuk melakukan sesuatu (*attitude towards behavior*) akan berpengaruh secara signifikan terhadap terbentuknya intensi untuk melakukan perilaku yang dimaksud (*behavioral intention*). Niat yang timbul untuk mengelola keuangan gereja dengan baik akan menghasilkan perilaku-perilaku yang menuju pada target transparansi. Temuan ini konsisten dengan teori prediksi perilaku (Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 1975). *Attitudes toward behavior* dalam penelitian ini dicerminkan dari usaha dari responden untuk mengusahakan iklim dan budaya transparan di lingkungan gereja. Intensi untuk berperilaku transparan dicerminkan dari pernyataan-pernyataan responden mengenai situasi-situasi transparan ideal yang seharusnya ada di jemaat, dan kesediaan diri untuk direview oleh pihak yang independen.

Hasil ini terkonfirmasi dengan hasil *in-depth interview* yang dilakukan pada beberapa responden yang ditentukan secara random. Keseluruhan responden sudah memiliki intensi untuk transparan atas proses pengelolaan keuangan yang ada di lembaga gereja. Hal ini mengkonfirmasi temuan statistik yang bernilai signifikan atas konstruk intensi transparansi. Namun demikian, terdapat kompleksitas untuk benar-benar mengubah intensi transparansi menjadi perilaku transparansi aktual di lembaga gereja. Salah satunya adalah dimensi etis-teologis yang melekat erat di lembaga gereja.

Ada banyak pertimbangan lain yang pada akhirnya menjadi dasar bagi majelis jemaat untuk mengambil keputusan untuk benar-benar mewujudkan intensi transparansi menjadi perilaku yang benar-benar transparan. Terdapat beberapa poin yang tidak dapat dibuka secara rinci, terutama hal-hal yang berkaitan dengan item-item sensitif seperti pengeluaran bagi pendeta jemaat. Dengan demikian, lembaga gereja memiliki batasan-batasan pengungkapan informasi keuangan yang tidak bisa diterapkan di lembaga lain, walaupun batasan tersebut berbeda di setiap gereja. Batasan itu tidak menyebabkan gereja menutup sama sekali informasi finansial gereja. Secara umum keterbukaan itu diwujudkan dengan kesiapan lembaga Majelis Jemaat memberikan detail laporan keuangan kepada anggota jemaat yang membutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Ajzen, I., & Fishbein, M. E. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour*. Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice Hall.
- Bandura, A. (1978). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Advances in Behaviour Research and Therapy*, 1(4), 139–161. [https://doi.org/10.1016/0146-6402\(78\)90002-4](https://doi.org/10.1016/0146-6402(78)90002-4)
- Bandura, A. (1986). *Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory* (1st ed.). Prentice Hall.
- Behn, B. K., DeVries, D. D., & Lin, J. (2010). The determinants of transparency in nonprofit organizations: An exploratory study. *Advances in Accounting*, 26(1), 6–12. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2009.12.001>
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 13–38. <https://doi.org/10.2308/bria.2003.15.1.13>
- Bolívar, M. P. R., Muñoz, L. A., & Hernández, A. M. L. (2013). Determinants of Financial Transparency in Government. *International Public Management Journal*, 16(4), 557–602. <https://doi.org/10.1080/10967494.2013.849169>
- Bryan, T. K., Robichau, R. W., & L'Esperance, G. E. (2020). Conducting and utilizing evaluation for multiple accountabilities: A study of nonprofit evaluation capacities. *Nonprofit Management and Leadership*, September 2019, 1–23. <https://doi.org/10.1002/nml.21437>
- Crawford, L., Morgan, G. G., & Cordery, C. J. (2018). Accountability and not-for-profit organisations: Implications for developing international financial reporting standards. *Financial Accountability and Management*, 34(2), 181–205. <https://doi.org/10.1111/faam.12146>
- Cucciniello, M., & Nasi, G. (2014). Transparency for Trust in Government: How Effective is Formal Transparency? *International Journal of Public Administration*, 37(13), 911–921. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.949754>
- Deloitte. (2015). *Financial reporting by not-for-profit entities in New Zealand: Your questions answered*. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nz/Documents/audit/2015/nz-en-financial-reporting-by-not-for-profit-entities-in-nz-your-questions-answered-final.pdf>
- Faizal, A. (2017, July). Eksekusi Pengurus Gereja di Surabaya, Juru Sita Dihadang Jemaat. *Kompas.Com*.
- Fishbein, M. E., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley.
- Gabrillin, A. (2015, July). Konflik Papua Bukan Masalah Agama, tapi Sosial dan Ekonomi. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/18/17354371/.Konflik.Papua.Bukan.Masalah.Agama.tapi.Sosial.dan.Ekonomi>.
- Gorsuch, R. L., & Ortberg, J. (1983). Moral obligation and attitudes: Their relation to behavioral intentions. *Journal of Personality and Social Psychology*, 44(5), 1025–1028. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.44.5.1025>
- Hofmann, M. A., & McSwain, D. (2013). Financial disclosure management in the nonprofit

- sector: A framework for past and future research. *Journal of Accounting Literature*, 32(1), 61–87. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2013.10.003>
- Ikhsan, A. (2020, August). Jemaat Gereja HKBP Cibinong Ricuh Saling Dorong dan Ejek, Diduga Masalah Internal. *Kompas.Com*.
- Ingram, R. W. (1984). Economic Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices. *Journal of Accounting Research*, 22(1), 126. <https://doi.org/10.2307/2490704>
- Kendall, J., & Knapp, M. (2000). Measuring the Performance of Voluntary Organizations. *Public Management*, 2(1), 105–132. <https://doi.org/10.1080/146166700360181>
- London, L., & Richardson, V. (2020). *Church Accounting: The How to Guide for Small & Growing Churches*. Deep River Press, Inc.
- Mendoza Ovando, C. (2020). What kind of transparency for the Church? Proposing operational transparency for processes, solutions and decisions in the Catholic Church. *Church, Communication and Culture*, 5(2), 210–234. <https://doi.org/10.1080/23753234.2020.1767508>
- Myers, J., & Sacks, R. (2003). Tools, Techniques and Tightropes: The Art of Walking and Talking Private Sector Management in Non-profit Organisations, is it Just a Question of Balance? *Financial Accountability and Management*, 19(3), 287–306. <https://doi.org/10.1111/1468-0408.00175>
- Ortega-Rodríguez, C., Licerán-Gutiérrez, A., & Moreno-Albarracín, A. L. (2020). Transparency as a key element in accountability in non-profit organizations: A systematic literature review. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14). <https://doi.org/10.3390/su12145834>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information System* (14th ed.). Pearson.
- Sanzo-Pérez, M. J., Rey-García, M., & Álvarez-González, L. I. (2017). The Drivers of Voluntary Transparency in Nonprofits: Professionalization and Partnerships with Firms as Determinants. *Voluntas*, 28(4), 1595–1621. <https://doi.org/10.1007/s11266-017-9882-9>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In *Handbook of Market Research*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8_15-2
- Speckbacher, G. (2008). Nonprofit Versus Corporate Governance: An Economic Approach. *Nonprofit Management and Leadership*, 18(3), 295–320. <https://doi.org/10.1002/nml>
- Torres, L., & Pina, V. (2003). Accounting for Accountability and Management in NPOs. *Financial Accountability & Management*, 19(3), 265–285.
- Welch, R. (2011). *Church Administration*. B&H Publishing Group.